

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	1
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media :

Halaman :

eg

Kompas	Kalteng Pos	Radarsampit
Palangka Post	<input checked="" type="checkbox"/> Tabengan	

Pemprov Segera Tindak Lanjuti LHP BPK

PALANGKA RAYA, PPOST

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalteng Semester II tahun 2021.

LHP tersebut terkait penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis kerja sama industri dan dunia kerja dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing.

Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo menegaskan, akan secepatnya menindaklanjuti rekomendasi LHP yang telah diserahkan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalteng ini.

"Pendidikan vokasi ini memang yang akan didorong pada visi misi periode kedua Gubernur Kalteng. Diharapkan, dengan adanya pendidikan kejuruan ini dapat menjadi harapan yang bisa dibanggakan dan diunggulkan seiring dengan hadirnya program strategis nasional yang memerlukan tenaga SDM siap pakai," ungkapnya, Selasa (14/12).

Edy menambahkan, LHP dari BPK RI nantinya akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan dinas terkait. "Untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan, kita harus melakukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait," tuturnya.

Edy menjelaskan, tujuan LHP adalah untuk menilai efektivitas upaya Pemprov Kalteng dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi berbasis kerja sama industri dan dunia kerja dalam rangka

mewujudkan SDM berkualitas dan berdaya saing.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemeriksaan mencakup penyelenggaraan pendidikan vokasi pada jenjang pendidikan menengah pada Pemprov Kalteng untuk tahun anggaran 2020 sampai dengan Semester II 2021 dengan sasaran.

Sasaran itu meliputi lima aspek, yaitu peningkatan peran dan kerja sama industri dan dunia kerja dalam pendidikan vokasi, reformasi penyelenggaraan pendidikan vokasi, peningkatan kualitas pendidikan vokasi, dan

penguatan sistem sertifikasi kompetensi.

Sementara itu, Kepala Perwakilan (Kalan) BPK RI Agus Priyono menyampaikan, penyerahan LHP merupakan suatu kewajiban konstitusional yang sesuai dengan aturan perundangan.

Dimana, LHP BPK yang sudah selesai itu diserahkan kepada pemerintah daerah. "Diharapkan pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang ada di LHP paling lambat 60 hari terhitung mulai dari saat laporan itu diserahkan," jelasnya. (mma/P4)



TERIMA LHP-Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, menerima penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalteng, kemarin.